

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia (SDM) kompeten merupakan salah satu pilar utama dalam membangun kekuatan daya saing suatu bangsa. Bagi Indonesia mewujudkan SDM kompeten dan berdaya saing di kancah Internasional merupakan kunci memenangkan persaingan di era global, namun demikian beberapa indikator Internasional masih mencatat ketertinggalan Indonesia dibandingkan Negara lain, terutama pada pembangunan sumber daya manusia. Disisi lain, kita mengetahui bahwa kesejahteraan rakyat Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi disamping dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan peningkatan produktivitas, efisiensi dan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu menjawab kebutuhan di masa depan tentunya lahir dari sistem pendidikan yang ditempuhnya. di Indonesia, aturan mengenai wajib belajar dan pendidikan nasional dimuat dalam UU RI No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mencantumkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, guna mewujudkan pendidikan yang terencana, terarah dan berkesinambungan, terdapat Jalur Pendidikan yaitu wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

Ruang lingkup Pendidikan yang tercantum dalam UU RI No 20 Tahun 2003 mencakup Pendidikan formal dan Nonformal. Sebagai insan pembelajar, Pendidikan tidak hanya ditempuh dalam konteks jalur Pendidikan formal namun salah satunya terdapat Jalur Nonformal. Pendidikan Non Formal yakni jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Dalam hal ini contoh dari Jalur Nonformal pendidikan salah

satunya Pendidikan Profesi yang didalamnya terdapat komponen atau proses Uji Kompetensi. Salah satu penyelenggara uji kompetensi juga dilakukan untuk melihat sejauh mana kompetensi kemampuan seseorang yaitu dibawah kewenangan dari BNSP / Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Sumber daya manusia yang berkualitas atau kompeten dapat diwujudkan melalui standarisasi dan sertifikasi kompetensi. Dengan bekal sertifikasi kompetensi, sumber daya manusia yang ada dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Disamping hal tersebut, adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dalam membangun kompetensi kerja yang dituangkan dalam Undang Undang RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pada UU RI No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat pelatihan kerja pada BAB V Pasal 9 Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan (Perindustrian, 2003). Salah satu tindak lanjut dari Pelatihan Kerja yakni Sertifikasi Profesi guna mencapai standar kompetensi SDM tenaga kerja. Selain itu, Uji Kompetensi Profesi juga menjadi salah satu proses di dalam Jenis Pendidikan Profesi menurut UU RI No 13 Tahun 2003 Pasal 15 yaitu Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, profesi, akademik, vokasi keagamaan dan khusus.

Saat ini, Menurut BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), jumlah tenaga kerja yang sudah tersertifikasi sebanyak 4,9 Juta jiwa. Hal ini masih sangat sedikit jumlahnya yakni sebesar 0.033% dari jumlah keseluruhan tenaga kerja di Indonesia sebanyak 146,62 juta orang menurut Kemnaker sehingga dapat dikatakan bahwa kebutuhan tenaga kerja dengan keahlian khusus diperlukan agar kompetensi mereka sesuai dengan standar di dunia kerja.

Menurut UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bagian ke tiga pasal 61 menjelaskan secara rinci mengenai Sertifikasi. Proses sertifikasi dilakukan guna memastikan seseorang telah sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan sesuai bidangnya. Sehingga dalam ruang lingkup kelembagaannya yang mengakomodir uji sertifikasi yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi termasuk ke dalam ruang lingkup Pendidikan.

Adapun sertifikasi adalah sertifikat berbentuk ijazah atau sertifikat kompetensi dalam hal ini LSP/Lembaga Sertifikasi Profesi melakukan hal tersebut setelah dilakukannya uji kompetensi. Selain itu disebutkan bahwa ijazah / sertifikat kompetensi diberikan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar atau penyelesaian setelah lulus ujian dalam hal ini Kompetensinya diujikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Tak hanya LSP, kemunculan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) juga menjadi alternatif lain agar para pencari kerja bisa meningkatkan kemampuan diri supaya sesuai dengan kebutuhan industri masa kini. Tak hanya para calon tenaga kerja, kehadiran LSP dan LPK ini turut membantu dunia usaha untuk bisa memperoleh tenaga-tenaga kerja baru yang makin berkualitas.

Dengan demikian, untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia diperlukan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan profesi masing-masing. Pengakuan kompetensi profesi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah organisasi independen yang dibentuk oleh para pemangku kepentingan antara lain industri, asosiasi profesi, asosiasi perusahaan dan para pakar pada sektor atau bidang keahlian tertentu.

Menurut pedoman BNSP Nomor 302 tahun 2005 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikasi Kompetensi Kerja, LSP adalah lembaga pelaksana uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang telah diakreditasi dan memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP, 2005). Lisensi diberikan melalui proses akreditasi oleh BNSP yang menyatakan bahwa LSP bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi. SDM yang berkompeten, menurut Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2006 yakni SDM dalam suatu bidang pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan diperlukan kompetensi tertentu.

Bentuk pengembangan sumber daya manusia sebagai "*intellectual asset*" menjadi salah satu faktor yang penting dalam mendukung produktivitas dan keunggulan kompetitif di dunia pekerjaan. Di Indonesia, pemerintah mengatur pelaksanaan asesmen kompetensi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP)

No. 10 Tahun 2018 dimana menugaskan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai lembaga yang memastikan pengembangan kompetensi di Indonesia. Yakni, asesmen kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang sudah mendapatkan lisensi dari BNSP.

Sertifikasi profesi adalah suatu pengakuan terhadap tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, keterampilan serta sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah dipersyaratkan. Dalam aktivitas sehari - hari dan tenaga kerja di Indonesia dibutuhkan latar belakang pendidikan yang beragam termasuk kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap SDM tersebut. Salah satu Organisasi penting yang memiliki SDM terbesar di Indonesia yaitu Perhimpunan Palang Merah Indonesia. Palang Merah Indonesia merupakan bagian dari Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yaitu perhimpunan sosial yang memiliki jaringan relawan terbesar di dunia. Palang Merah Indonesia memiliki mandat tidak hanya melakukan pelayanan kemanusiaan namun memastikan SDM yang melakukan giat kemanusiaan tersebut memiliki kompetensi dan pendidikan yang sesuai standar.

Menurut Lembaga Sertifikasi Profesi Palang Merah Indonesia, tercatat hanya 224 orang tersertifikasi dari total 8274 Staf dan 45.685 Relawan se Indonesia, tentu hal ini menjadi sorotan agar lebih banyak SDM yang berkualitas dapat melakukan uji kompetensi. Menjawab kebutuhan tersebut, diperlukan Lembaga Sertifikasi Profesi Tempat Uji Kompetensi di berbagai daerah di Indonesia agar SDM PMI lebih berkompeten dan lebih banyak SDM PMI di seluruh Indonesia dengan mudah mengakses dan mengujikan kompetensinya di Lembaga Sertifikasi Profesi Palang Merah Indonesia.

Uji Kompetensi menjadi sangat penting agar SDM PMI dapat memiliki acuan standar profesional kompetensi yang dimiliki guna melakukan kerja kemanusiaan dan kerja sosial yang sesuai kapasitas dan kompetensi yang dimiliki. Mengingat, Palang Merah Indonesia sangat dekat dengan masyarakat dan memiliki keterampilan khusus seperti Pertolongan Pertama, Promosi Kesehatan, Fasilitator Sekolah Aman Bencana, Fasilitator / Pelatih Palang Merah Remaja, Petugas Ambulans, Petugas Layanan Dukungan Psikososial yang mana posisi relawan/ SDM PMI tidak selalu memiliki latar belakang pendidikan sesuai bidang

tersebut namun pernah mendapat/mengikuti pelatihan bidang/teknis agar kapasitasnya meningkat atau sesuai bidang tersebut. Untuk memperkuat kompetensi tersebut, diperlukan uji kompetensi, oleh sebab itu, Lembaga Sertifikasi Profesi yang didalam mekanismenya terdapat Tempat Uji Kompetensi harus mudah diakses dan tersebar luas di seluruh Indonesia.

Tempat Uji Kompetensi LSP PMI tersebar di seluruh Indonesia dan hanya terdapat di 23 lokasi Kota/Kabupaten dan Provinsi. LSP/Lembaga Sertifikasi Profesi Palang Merah Indonesia merupakan Lembaga yang ditunjuk oleh BNSP untuk melakukan uji kompetensi pada asesi. LSP PMI itu sendiri merupakan lembaga Pendidikan PMI yang berada pada pengawasan BNSP dalam pelaksanaannya. Ruang Lingkup organisasi PMI yang didalamnya terdapat LSP PMI ini berada pada divisi/bagian Pusdiklat/Pusat Pendidikan dan Latihan untuk PMI Pusat, LSP PMI di PMI Provinsi berada di bagian Badiklat / Badan Pendidikan dan Latihan, dan LSP PMI di PMI Kota berada di bagian Diklat atau Pendidikan dan Latihan dalam hal ini konteks fungsionalnya ada di Divisi PMR dan Relawan. Sehingga dalam pelaksanaannya masih relevan dengan ruang lingkup Manajemen Pendidikan.

Jumlah Tempat Uji Kompetensi masih terbilang sangat sedikit dibandingkan jumlah keseluruhan Kota/Kabupaten di Indonesia sehingga akses masyarakat/SDM PMI untuk melakukan uji sertifikasi belum tersedia secara maksimal. Melihat fenomena ini, ternyata banyak PMI Kota/Kabupaten belum mendirikan/membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana untuk memenuhi standar pembentukan Tempat Uji Kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP. Untuk itu, diperlukan analisis lebih jauh agar Tempat Uji Kompetensi di PMI berbagai daerah dapat terbentuk sehingga Pembangunan merata yang berimplikasi pada pemerataan uji kompetensi untuk SDM PMI.

Salah satu Lembaga Sertifikasi Profesi yang ada di DKI Jakarta yaitu LSP TUK PMI Kota Jakarta Timur. Saat ini, Lembaga Sertifikasi Profesi Uji Kompetensi PMI Kota Jakarta Timur menjadi satu satunya LSP TUK organisasi PMI Kota Jakarta Timur yang berada di Jakarta Timur yang telah menjadi percontohan bagi PMI di seluruh DKI Jakarta bahkan di seluruh Indonesia. Hal ini

dibuktikan dari Pernyataan M.Arifin Ketua Lembaga Sertifikasi Palang Merah Indonesia (tingkat pusat) terdapat puluhan Palang Merah Indonesia kota lainnya yang mendatangi LSP TUK PMI Kota Jakarta Timur dengan mengadakan *study learning/* Studi Banding sepanjang tahun 2021 dan 2022 sehingga dapat mengambil pelajaran dari pengalaman baik pengelolaan Tempat Uji Kompetensi di PMI Kota Jakarta Timur. Salah satu kunci kesuksesan pengelolaan manajemen TUK di PMI Kota Jakarta Timur, yakni dengan menerapkan pedoman BNSP No. 206 Tahun 2014 melalui pengelolaan sarana dan prasarana di Tempat Uji Kompetensi. Sarana dan Prasarana ini diperlukan untuk melakukan uji kompetensi profesi bagi SDM yang akan disertifikasi. PMI Kota Jakarta Timur juga berdasarkan laporan tahunan 2023 telah menerima kunjungan studi banding dari PMI Kab/Kota dan Provinsi lain sebanyak 11 kali dalam satu tahun dan bermitra dengan 34 perusahaan/instansi yang dilatih oleh SDM PMI Jakarta Timur selama tahun 2023. Oleh karena itu, Praktik baik yang dilakukan PMI Kota Jakarta Timur dalam setahun terakhir ini dapat menjadi pembelajaran dan referensi pengelolaannya bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Palang Merah Indonesia lainnya. Lembaga Sertifikasi Profesi di PMI Kota Jakarta Timur telah memenuhi kriteria dengan sangat baik sesuai dengan hasil uji witness dari BNSP saat pembentukan Tempat Uji Kompetensi yakni telah sesuai dengan standar Persyaratan Teknis Mata Uji Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi Palang Merah Indonesia yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan 027/LSP-PMI/XII/2021 Ketua LSP Palang Merah Indonesia. Praktik baik yang dijadikan acuan dari Instansi dan PMI lainnya salah satunya mengenai manajemen sarana dan prasarana di PMI Kota Jakarta Timur yang menjadi contoh bagi PMI Kota/Kab lainnya berdasarkan informasi standarisasi yang dilakukan oleh Pusdiklat PMI Pusat.

Hal – hal tersebut yang melatar belakangi peneliti untuk mengetahui lebih detail, mengenai Manajemen sarana dan prasarana di Lembaga Sertifikasi Profesi Tempat Uji Kompetensi PMI Kota Jakarta karena menjadi salah satu faktor penting Lembaga Sertifikasi Profesi untuk meningkatkan SDM yang kompeten dengan menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana dengan baik sebagai upaya proses menunjang aktivitas dan kegiatan uji kompetensi yang rutin

dilakukan. Kemudian peneliti jadikan judul Tesis yaitu: Manajemen Sarana dan Prasarana Lembaga Sertifikasi Profesi Uji Kompetensi PMI Kota Jakarta Timur.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini meliputi bagaimana manajemen sarana dan prasarana di Lembaga Sertifikasi Profesi Uji Kompetensi PMI Kota Jakarta Timur. Dengan Sub Fokus Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan sarana dan prasarana di Lembaga Sertifikasi Profesi Uji Kompetensi PMI Kota Jakarta Timur.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan pernyataan penelitian tersebut secara umum tujuan penelitian ini untuk menganalisis Manajemen Sarana dan Prasarana Lembaga Sertifikasi Profesi Uji Kompetensi PMI Kota Jakarta Timur dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan (*planning*) sarana dan prasarana di Lembaga Sertifikasi Profesi Uji Kompetensi PMI Kota Jakarta Timur?
2. Bagaimana pengorganisasian (*organizing*) sarana dan prasarana di Lembaga Sertifikasi Profesi Uji Kompetensi PMI Kota Jakarta Timur?
3. Bagaimana pelaksanaan (*actuating*) dalam memajemen sarana dan prasarana di Lembaga Sertifikasi Profesi Uji Kompetensi PMI Kota Jakarta Timur?
4. Bagaimana pengawasan (*controlling*) sarana dan prasarana di Lembaga Sertifikasi Profesi Uji Kompetensi PMI Kota Jakarta Timur?

D. Manfaat Penelitian

Upaya dalam memberikan suatu rekomendasi perbaikan pengelolaan tempat uji kompetensi PMI di masa depan, maka hasil dari penelitian dapat memberikan informasi yang relevan dan solutif sehingga berdampak positif bagi kemajuan Lembaga Sertifikasi Profesi. Adapun manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Menambah referensi kepada perkembangan ilmu dalam bidang pendidikan yaitu lembaga sertifikasi profesi yang berkaitan dengan pengelolaan sarana

dan prasarana lembaga sertifikasi profesi meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang ada di Lembaga Sertifikasi Profesi Uji Kompetensi PMI Kota Jakarta Timur untuk memajukan lembaga sertifikasi menjadi lebih baik.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Lembaga Sertifikasi Uji Kompetensi PMI : dalam merumuskan program sertifikasi bagi tenaga Relawan PMI dan Masyarakat dapat melakukan peningkatan dalam pengelolaan manajemen sarana dan prasarana sebagai penunjang aktivitas uji kompetensi dan menambah skema okupasi yang diujikan. untuk itu sarana dan prasarana harus mendukung agar uji kompetensi dapat terselenggara tanpa ada kekurangan dari segi sarana dan prasarananya. Sarana dan Prasarana yang memadai untuk meningkatkan kualitas dan mutu Lembaga Sertifikasi Profesi PMI Kota Jakarta Timur.
2. Bagi Organisasi Palang Merah Indonesia lainnya : sebagai referensi pembentukan dan pengelolaan Lembaga Sertifikasi Profesi Uji Kompetensi agar melakukan pengelolaan sarana dan prasarana dengan baik karena sarana prasarana menjadi faktor penunjang terselenggaranya uji kompetensi tersebut.
3. Bagi penulis: harus dapat meningkatkan diri dengan memiliki kompetensi sehingga dapat bermanfaat bagi keluarga, lingkungan tempat tinggal dan agar lebih sadar untuk mengelola sarana dan prasarana apapun dengan baik karena tentunya sarana dan prasarana tersebut memiliki kebermanfaatannya bagi orang lain.

E. State of the Art

Peneliti melakukan penelusuran studi literatur untuk menentukan *state of the art* dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 *State of the art*

NO	PENULIS DAN TAHUN PENELITIAN	JUDUL	DESKRIPSI	HASIL PENELITIAN	PERBANDINGAN DENGAN PENELITIAN INI
1.	Aji Prasetyo (2023)	Pengelolaan Lembaga sertifikasi profesi (LSP P1) dalam Menyiapkan Lulusan Perguruan Tinggi di Dunia Kerja	Sistem Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di lingkup Perguruan Tinggi berperan penting untuk menyiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja. Selain itu, guna mengetahui bagaimana mekanisme kompetensi pada LSP-P1 di lingkup Perguruan Tinggi, maka perlu dilakukan kajian untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaannya.	Secara umum mekanisme pengelolaan LSP-P1 di Perguruan Tinggi Jawa Timur telah sesuai pedoman BNSP	Penelitian Aji Prasetyo berfokus pada kelebihan dan kekurangan dari mekanisme pengelolaan sertifikasi profesi dalam rangka menyiapkan lulusan di dunia kerja sedangkan penelitian saya akan menjawab juga kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaan sarana dan prasarana yang kemudian akan dideskripsikan di bab 4 penelitian.
2.	Rasyid Asngari (2023)	Evaluasi Program Sertifikasi Kompetensi Pendidik POLRI di Lembaga Sertifikasi POLRI	Mengevaluasi pelaksanaan program sertifikasi yang meliputi Analisa proses pelaksanaan dan analisa hasil sertifikasi	Evaluasi Context, LSP Polri telah melaksanakan kebijakan program sertifikasi kompetensi pendidik Polri sesuai peraturan yang ada.	Perbedaan penelitiannya yaitu penelitian Rasyid lokusnya di Lembaga Sertifikasi Polri dan mengevaluasi context kebijakan sedangkan yang akan dilakukan di penelitian ini adalah di LSP PMI dan menganalisis manajemen sarana dan

NO	PENULIS DAN TAHUN PENELITIAN	JUDUL	DESKRIPSI	HASIL PENELITIAN	PERBANDINGAN DENGAN PENELITIAN INI
					prasarananya
3.	Muji Slamet, Mulyoto (2021)	Manajemen Uji Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi(LSP) SMK Negeri 1 Kebumen	Menjelaskan analisis perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan uji kompetensi serta faktor penghambat dan pendukung uji kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi SMK Negeri 1 Kebumen	Tahapan uji kompetensi sudah berjalan baik mulai perencanaan sampai dengan pengawasan sudah dilakukan sesuai dengan kajian teori yang ada serta proses uji kompetensi yang valid, reliabel dan fleksibel bagi semua peserta uji/Asesi	Penelitian dari Muji Slamet Mulyoto berfokus pada mekanisme/alur uji kompetensi di LSP SMK Negeri 1 Kebumen sedangkan penelitian saya akan berfokus pada manajemen sarana dan prasarana di Lembaga Sertifikasi Profesi Uji Kompetensi PMI Kota Jakarta Timur.
4.	Sartono Manto Suwarno (2020)	Evaluasi Tempat Uji Kompetensi Teknisi Otomotif dalam Peningkatan Mutu Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan	Mengevaluasi konteks, input, proses dan komponen produk dalam Evaluasi Penyelenggaraan Tempat Uji Kompetensi Teknisi Otomotif di SMK Negeri 2 Salatiga.	1). Evaluasi Konteks Penyelenggaraan Tempat Uji Kompetensi Teknisi Otomotif di SMK Negeri 2 Salatiga didasarkan pada identifikasi kebutuhan dan kebijakan pemerintah; 2). Masukan Evaluasi Penyelenggaraan Tempat Uji Kompetensi Teknisi Otomotif di SMK Negeri 2 Salatiga telah mempunyai kesiapan teknis dan administratif	Perbandingan dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang akan dilakukan akan mengarah pada konteks sarana dan prasarana yang menunjang tempat uji kompetensi berdasarkan kebutuhan dalam hal ini akan mengembangkan proses evaluasi serta tindak lanjut dari sarana prasarana yang dibutuhkan

NO	PENULIS DAN TAHUN PENELITIAN	JUDUL	DESKRIPSI	HASIL PENELITIAN	PERBANDINGAN DENGAN PENELITIAN INI
				di Bidang Keahlian Teknik Otomotif; dan Uji Kompetensi Teknisi Otomotif; 3). Evaluasi Proses Penyelenggaraan Tempat Uji Kompetensi Teknisi Otomotif masih belum sesuai dengan harapan dan rencana yang telah dibuat	
5.	Ratna Ayu Rizqiyah dan Fitrotun Niswah, S.AP., M.AP (2019)	Manajemen Pelatihan Institusional berbasis Kompetensi Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Mojokerto)	Mendeskripsikan manajemen pelatihan institusional berbasis kompetensi dalam tahap analisis kebutuhan	Manajemen pelatihan institusional berbasis kompetensi dalam tahap analisis kebutuhan pelatihan telah dilakukan dengan baik di mana program pelatihan	Manajemen pelatihan institusional berbasis kompetensi dalam tahap analisis kebutuhan pelatihan telah dilakukan dengan baik dimana program pelatihan yang akan dibuka pada tiap periode telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, pasar kerja dan anggaran yang telah diberikan. Perencanaan program pelatihan, yang meliputi perencanaan instruktur dimana beberapa instruktur di UPT Pelatihan Kerja Mojokerto memiliki asisten untuk membantu kegiatan pelatihan agar berjalan dengan baik.
6.	Devi Damayanti (2019)	Manajemen Sertifikasi Profesi oleh	Penelitian ini dilakukan untuk	Hasil penelitian ini adalah sebelum	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah

NO	PENULIS DAN TAHUN PENELITIAN	JUDUL	DESKRIPSI	HASIL PENELITIAN	PERBANDINGAN DENGAN PENELITIAN INI
		Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP) Sekolah menengah kejuruan Paramitha Jakarta	Mengetahui perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi sertifikasi profesi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1) SMK Paramitha Jakarta.	memulai sertifikasi kompetensi, LSP P1 SMK Paramitha perlu membentuk organisasi yang solid serta memiliki legalitas hukum berupa SK yang ditanda tangani oleh pimpinan. LSP juga wajib menyiapkan segala dokumen, sarana, prasarana, dan perangkat kerja asesmen juga harus dibutuhkan. Setelah semua persiapan itu selesai maka LSP akan mengajukan izin lisensi kepada BNSP. Jika semua hal sudah memenuhi sesuai dengan pedoman BNSP, maka LSP tersebut berhak memperoleh izin lisensi dari BNSP. LSP yang sudah berlisensi sudah boleh melakukan tugas asesmennya kepada peserta didik	penelitian yang akan dilakukan akan berfokus dan menganalisa secara mendalam mengenai sarana dan prasarana pada lembaga sertifikasi profesi tidak dikaitkan dengan perangkat lainnya sehingga penelitian lebih mendalam dan fokus.
7.	Heru Karyana (2018)	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi	Mendeskripsikan karakteristik,	Pengelolaan LSP P1 meliputi lisensi skema	Penelitian Heru menjelaskan mengenai mekanisme dan

NO	PENULIS DAN TAHUN PENELITIAN	JUDUL	DESKRIPSI	HASIL PENELITIAN	PERBANDINGAN DENGAN PENELITIAN INI
		Pihak 1 di SMK Negeri 1 Purworejo	mekanisme sertifikasi kompetensi serta mendiskripsikan kelebihan dan kekurangan sertifikasi kompetensi pada Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 di SMK Negeri 1 Purworejo.	sertifikasi, sinkronisasi kurikulum, penyediaan sarana prasarana standar industri, pembiayaan, pemenuhan asesor kompetensi, penyelenggaraan uji sertifikasi sesuai pedoman, serta penerbitan dan pemeliharaan sertifikat kompetensi.	kekurangan serta kelebihan proses sertifikasi sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan berfokus pada manajemen sarana prasarana dan mengidentifikasi hal baik dan yang harus ditingkatkan dari manajemen sarana dan prasarananya
8.	Andriansyah Maulana, Christina Juliane (2022)	Implementasi Manajemen Pengetahuan Dalam Sistem Layanan Sertifikasi Profesi (Studi Kasus SMKN 1 Garut)	Hasil penelitian maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perancangan model manajemen pengetahuan dibutuhkan oleh LSP P1 SMKN 1 Garut yang dimana dari pengetahuan tacit dalam bentuk abstrak yang dilakukan capture dari para ahli yang terlibat	Perancangan model manajemen pengetahuan dibutuhkan oleh LSP P1 SMKN 1 Garut	Penelitian sebelumnya menerapkan analisa manajemen sistem layanan sedangkan pengembangannya adalah manajemen sistem layanan dari segi sarana dan prasarananya
9.	Adi Gunawan Sofwan Amy Yayuk Sri Rahayu (2021)	Analisis Desain Struktur Organisasi Pada Lembaga	Menganalisa seberapa jauh desain struktur organisasi LPS LEMDIKLAT	Menganalisa seberapa jauh desain struktur organisasi LPS LEMDIKLAT	Pembaharuannya yaitu berfokus pada salah satu unsur di struktur organisasi yakni pada divisi sarana dan

NO	PENULIS DAN TAHUN PENELITIAN	JUDUL	DESKRIPSI	HASIL PENELITIAN	PERBANDINGAN DENGAN PENELITIAN INI
		Sertifikasi Profesi LEMDIKLAT POLRI	POLRI dalam menjalankan roda organisasinya	POLRI dalam menjalankan roda organisasinya	prasarana serta pengelolaannya
10.	Niko Grataridarga, Muhammad Usman Noor, & Wiwiet Mardiaty (2023)	Digitalisasi Arsip Administrasi Uji Sertifikasi Kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Indonesia	Proses digitalisasi kegiatan uji sertifikasi kompetensi di LSP UI dilakukan dengan pembuatan sistem administrasi berbasis web. arsip penguji (asesor), arsip pendaftaran, arsip pelaksanaan ujian serta hasil ujian	LSP sudah melakukan proses digitalisasi uji sertifikasi kompetensi di LSP UI	Digitalisasi arsip pada penelitian ini tidak akan lepas dari kualifikasi sarana prasarana yang baik oleh sebab itu diperlukan manajemen sarana dan prasarana yang baik dan akan dibahas di penelitian selanjutnya

Berdasarkan analisa dari 10 Penelitian sebelumnya yang relevan pembahasannya dengan variabel-variabel yang akan diteliti oleh Peneliti, Penelitian sebelumnya umumnya membahas mengenai alur dan mekanisme uji sertifikasi di berbagai LSP atau lembaga Sertifikasi Profesi hal ini menjadi sangat jenuh jika penelitiannya hanya membahas mengenai alur dan mekanisme uji sertifikasi. Penelitian lainnya juga banyak membahas seputar struktur, administrasi, mekanisme pelaporan, manajemen, dan pengelolaan Lembaga Sertifikasi Profesi secara umum dan tidak membahas secara spesifik topik yang akan diperdalam. Umumnya juga penelitian sebelumnya mengkaji seputar implementasi dan evaluasi uji kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan yang menjadi Lokasi Penelitian/Lokus Penelitian sudah sangat banyak di lembaga Pendidikan formal seperti sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Padahal, masih banyak lagi

ruang lingkup kelembagaan Pendidikan yang melekat pada organisasi yang ada di masyarakat seperti PMI Kota Jakarta Timur.

Untuk itu, letak kebaruan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah tempat penelitian yang masih jarang dibahas yaitu di Lembaga Sertifikasi Profesi Tempat Uji Kompetensi PMI Kota Jakarta Timur dan mengkaji serta mengembangkan secara spesifik pada konteks manajemen sarana dan prasarana karena sarana dan prasarana menjadi salah satu indikator baiknya mutu layanan dan profesionalitas SDM yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang baik dapat menjadikan LSP/Lembaga Sertifikasi Profesi memiliki kinerja yang baik sehingga output yang dihasilkan juga dapat membantu meningkatkan kualitas SDM.

